

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil analisa dan pembahasan mengenai prosedur penggunaan belanja langsung dan perhitungannya menggunakan metode rasio keuangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari keseluruhan hasil analisa sebagai berikut :

1. Tahapan prosedur dalam pencairan belanja langsung daerah, dimulai dari penerbitan Surat Pencairan Dana (SPD) dan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh BAPENDA, tahap kedua, penerbitan dan penyetujuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan yang terakhir, pencairan dana oleh Kas Umum Daerah pada Bank yang ditunjuk sebagai Kas Umum Daerah.
2. Berdasarkan penghitungan keberhasilan kinerja keuangan BAPENDA Kota Padang menggunakan analisis rasio keuangan, dapat disimpulkan bahwa kinerja BAPENDA Kota Padang belum maksimal dalam menyerap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun juga diketahui bahwa kinerja BAPENDA Kota Padang telah menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun periode analisa yaitu tahun 2015-2017.
3. Penghitungan menggunakan analisis rasio keuangan pada tahun sebelumnya akan sangat menentukan kebijakan dalam penganggaran belanja langsung pada tahun berikutnya. Begitu juga menentukan kebijakan anggaran belanja

langsung pada tahun 2018, kebijakan tersebut dibuat berdasarkan evaluasi perhitungan rasio keuangan pada tahun-tahun sebelumnya. Analisa rasio keuangan merupakan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung pada periode berikutnya. Anggaran belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung harus disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan pendapatan daerah karena anggaran belanja pemerintah daerah tidak boleh melebihi pendapatan daerah tersebut.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

### **1. Bagi Instansi**

BAPENDA sebaiknya mengevaluasi sistem yang digunakan dalam menyerap Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu BAPENDA harus melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti karena realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut akan digunakan untuk belanja khususnya belanja langsung yang merupakan belanja daerah yang berguna untuk mendorong pelayanan pemerintahan kepada masyarakat lebih maksimal, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

### **2. Bagi Peneliti/Mahasiswa**

Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian sejenis namun membandingkan kinerja dua instansi pemerintah daerah yang berbeda serta menambah periode amatan dan jenis rasio yang digunakan.

